

PENDIDIKAN POLITIK LINTAS GENERASI DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK MENGHADAPI SUKSESI TAHUN POLITIK

Harry Sugara¹, Fitri Mutmainnah², Della Nor Safitri³

^{1,2,3} Universitas Kahuripan Kediri, Jl. PB. Sudirman No. 27 Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia
email: ¹harry@kahuripan.ac.id

Abstrak

Kekhawatiran menurunnya animo masyarakat dari beberapa kelompok generasi pemilih menghadapi suksesi agenda politik menjadi tantangan bagi lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berperan penting dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Tingginya partisipasi politik begitu diharapkan dalam menentukan nasib bangsa dan negara ke depan pasca terpilihnya pemimpin Indonesia yang baru. Sebagai bentuk optimalisasi tingkat partisipasi politik dibutuhkan Pendidikan politik dengan konsep yang tepat diharapkan dapat mewujudkan partisipasi politik lintas generasi yang ada di masyarakat daerah. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap implementasi pendidikan politik lintas generasi dalam membangun partisipasi politik menghadapi suksesi tahun politik di 2024. Pendidikan politik lintas generasi yang diimplementasikan melalui kolaborasi beragam pendekatan dan model yaitu melalui jalur formal pendidikan, pendekatan seni, budaya kemasyarakatan, komunitas/organisasi sosial, optimalisasi dan pengembangan teknologi media sosial serta pendidikan politik kolaboratif dan partisipatif.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Lintas Generasi, Partisipasi Politik.

Abstract

Concerns about declining public interest from several generations of voters in facing a succession of political agendas are a challenge for the General Elections Commission which plays an important role in organizing the 2024 elections. High political participation is expected in determining the fate of the nation and state in the future after the election of a new Indonesian leader. As a form of optimizing the level of political participation, political education with the right concept is needed to realize cross-generational political participation in local communities. The method in this study uses descriptive qualitative which aims to reveal the implementation of cross-generational political education in building political participation in facing the succession of the political year in 2024. Cross-generational political education is implemented through the collaboration of various approaches and models, namely through formal education, the arts approach, social culture, social communities/organizations, optimization and development of social media technology as well as collaborative and participatory political education.

Keywords: Political Education, Cross Generations, Political Participation.

PENDAHULUAN

Partisipasi politik Indonesia fluktuatif setiap tahun. Tahun 2019 mengalami lonjakan partisipasi pemilu pada Pilpres yang cukup tinggi yakni sebesar 81,97% jika dibandingkan pada tahun 2014 hanya 69,58%. Namun berselang satu tahun muncul laporan *The Economist Intelligence Unit* pada tahun 2020, melalui laporannya tingkat partisipasi politik Indonesia mengalami tren penurunan sejak tahun 2018 (6,67) dan pada tahun 2019-2020 stagnan pada angka (6,11) (*The Economist Intelligence Unit* 2021). Temuan senada juga diperkuat melalui laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2019, dan 2021 Democracy Report, menunjukkan kualitas demokrasi menunjukkan adanya pengurangan signifikan yang tidak hanya menyentuh aspek kebebasan sipil dan pluralisme, namun juga fungsi pemerintahan (Jati 2021).

Jones dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kesadaran politik terbentuk karena warga negara yang terlibat adalah yang berkenan menerima dan ingin memahami tentang situasi

keadaan negara dan dinamika elit partai mereka (Jones 2020). Maka pendidikan politik menjadi isu strategis yang harus diperhatikan. Tujuan pendidikan politik tertuang pada Pasal 31 Undang-Undang No.2 Tahun 2008, tujuan pendidikan politik antara lain: 1) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Person menyampaikan beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik (Persson 2015). Pendidikan politik tidak hanya merujuk pada generasi muda namun juga generasi yang telah dewasa (Sugara 2022). Berdasarkan Teori Generasi yang dicetuskan William Strauss dan Neil Howe ada enam generasi yang lahir setelah perang dunia kedua dan berhubungan dengan masa saat ini (Shahreza 2017). *Pertama*, Generasi Traditionalist (1928-1945). Memiliki karakter semangat perjuangan yang tinggi. *Kedua*, Generasi Baby Boomers (1946-1964). Memiliki karakter yang adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri, mempunyai pengalaman hidup dalam dinamika perubahan politik yang cepat. *Ketiga*, Generasi X (1965-1976). Memiliki karakter mandiri, disiplin, pekerja keras, logis dan mengutamakan karir. *Keempat*, Generasi Y (1977-1998), memiliki karakter canggih, kreatif, bebas dan berani mengambil resiko. *Kelima*, Generasi Z (1999-2012). Memiliki karakter berpikiran terbuka, menyukai keberagaman, tertantang hal-hal baru, berfikir kritis dan ingin menjadi berbeda atau membawa perubahan. *Keenam*, Generasi Alpha (2013-2025). Memiliki kecenderungan karakter terdidik dan menguasai berbagai teknologi elektronik dan komunikasi.

Berdasarkan latar belakang dari teori generasi tersebut yang didasarkan pada tahun dan umur produktif maka dapat dilihat dominasi komposisi partisipasi politik pada Pemilu 2024 nanti. *Pertama*, akan didominasi oleh generasi Y yang paling banyak memberikan suara dan sebagian diikuti generasi Z karena sebagian lainnya tergolong belum berumur 17 tahun. *Kedua*, generasi X dan yang *ketiga*, diikuti oleh generasi *baby boomers*. Sehingga perbedaan karakteristik generasi tersebut tentu akan berpengaruh terhadap perbedaan literasi, kesadaran dan tingkat partisipasi politik.

METODE

Pendekatan metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell 2015). Ide

pentingnya yaitu peneliti menuju lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan tentang suatu keadaan ilmiah. Penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan data yang dikumpulkan berupa tulisan, kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap implementasi pendidikan politik lintas generasi dalam membangun partisipasi politik menghadapi suksesi tahun politik di 2024. Maka dari itu dalam penelitian kualitatif ini berhubungan langsung dengan perilaku, pengalaman, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik. Tempat penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah di kabupaten Kediri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Politik Melalui Jalur Pendidikan Formal

Pendidikan politik jalur pendidikan formal ditempuh oleh KPU Kabupaten Kediri melalui kegiatan KPU *goes to School* sebagai salah satu program Pendidikan Pemilih Pemula yang didominasi oleh Generasi Z. Diantaranya melalui kunjungan ke tingkat Pendidikan menengah yaitu SMA, SMK dan Sederajat yang rata-rata berusia 17 – 18 tahun pada kelas 11 dan 12. Dalam program kunjungan KPU Kabupaten Kediri melakukan sosialisasi Pendidikan politik dengan tema “Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu Serentak Tahun 2024”. Selain itu KPU Kabupaten Kediri juga melakukan pendekatan Pendidikan politik pada Pondok Pesantren yang ada di kabupaten Kediri dengan tema “Peningkatan Partisipasi Politik Kaum Santri Pondok Pesantren”.

KPU juga mengoptimalkan peran Pendidikan politiknya dengan kegiatan KPU *goes to Campus*. Kehadiran KPU menjadi narasumber di beberapa undangan Universitas dan Sekolah Tinggi di Kabupaten Kediri yang didominasi oleh Generasi Y dan Z dengan rentang usia mahasiswa program Sarjana rata-rata berumur diantara 19-27 tahun. Kegiatan banyak dikemas dalam bentuk sosialisasi tentang Gerakan Cerdas Memilih dengan tema “Suara Milenial Menuju Pesta Demokrasi 2024”. Adapun materi dipaparkan dengan metode presentasi dan diskusi interaktif antara KPU dan peserta didik. Pendidikan politik di Pendidikan menengah dan perguruan tinggi menjadi poin penting karena Generasi Milenial harus berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya di Pemilu Tahun 2024. Hal tersebut didasarkan pemilih Generasi Milenial memiliki prosentase terbanyak dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jalur pendidikan formal memiliki peran vital dalam mensukseskan program pendidikan pemilih tentang pemahaman urgensi Pemilu sebagai agenda politik negara. Sawyer dan Korotayev memaparkan tentang “*Theory of Cognitive Mobilization*” bahwa “*As the education level of individuals' increases, this “increases the individual's capacity to receive and interpret*

messages relating to a remote political community” (Sawyer, P. S., & Korotayev 2022). Informasi dan isu-isu politik akan lebih banyak dapat diterima oleh kelompok generasi terdidik sehingga kemampuan untuk mengakses dan memahami agenda politik yang berdampak pada masa depan warga masyarakat diharapkan mudah dipahami dengan baik. Maka Pendidikan politik melalui jalur formal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri menjadi strategi yang relevan dengan tingginya dominasi kelompok Generasi Y dan Z dalam ajang Pemilu di tahun 2024 mendatang.

Pendidikan Politik Berbasis Pendekatan Seni dan Budaya Kemasyarakatan

Upaya pendidikan politik oleh KPU Kabupaten Kediri juga dilakukan dengan melakukan pendekatan budaya kemasyarakatan yang kental dengan kegiatan keagamaan diantaranya yaitu Pengajian, Dzikir dan KPU bersholawat bersama. Pendidikan politik dilakukan dalam bentuk sosialisasi di hadapan ribuan Jamaah Pengajian Malam Jumat (PMJ) dalam rangka memberikan edukasi dan informasi dalam menyongsong Pemilu Serentak di tahun 2024. PMJ menjadi salah satu sasaran sosialisasi Pendidikan politik oleh KPU karena selalu dihadiri oleh banyak jamaah yang didominasi oleh Generasi X, Y dan sebagian Generasi Baby Boomers dengan kisaran usia 30 – 60 tahun keatas. Dalam sosialisasinya ditekankan tentang pentingnya peran masyarakat dalam Pemilihan Umum dan dapat aktif berpartisipasi serta dapat menjadi Pemilu Serentak tahun 2024. Menurut Covert dan Wesburn, agama memiliki peran khusus dalam sebuah pemilihan presiden (Barokah 2022). Tokoh-tokoh agama oleh karenanya memegang peran yang sangat strategis dalam melakukan transformasi nilai-nilai demokrasi dan kesadaran politik kepada jemaatnya masing-masing.

Pendidikan politik melalui pendekatan Kesenian juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri menggelar Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2023. Acara Kirab Pemilu dibalut dengan Pagelaran seni budaya bertema “Deklarasi Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa” dalam Rangka Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu 2024. Kegiatan Kirab Pemilu adalah momentum KPU sebagai upaya sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Kirab dilakukan sebagai wujud sosialisasi tentang partai peserta Pemilu 2024, bendera partai, dan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 yang terpasang di kendaraan bak terbuka KPU yang berjalan beriringan dari kecamatan ke kecamatan. Kegiatan ini sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat Kabupaten Kediri untuk hadir ikut serta dalam memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara. Pendidikan politik melalui pagelaran kirab Pemilu tersebut telah menyasar banyak kalangan Generasi X, Y dan Z yang tergabung dan hadir secara langsung di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri.

Pendidikan politik melalui seni dan budaya kemasyarakatan menjadi salah satu strategi yang inovatif yang dilakukan oleh KPU. Dalam analisa konsep oleh Fuad, Musa, & Hashim (2022) *“The type of culture that had an impact on the educational context was distinguished into three categories, which were organizational cultures, sociocultural norms and national cultures”* (Fuad, D. R. S. M., Musa K., & Hashim 2022). Maka lingkungan masyarakat yang kondusif dan hubungan positif yang dijalin dengan baik akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap budaya sehingga dapat mempengaruhi, berbagi dan membentuk perilaku yang diinginkan. Kebudayaan suatu masyarakat akan mempengaruhi proses pembentukan kepribadian seorang individu dalam pendidikan. Dalam konsep ini, pendidikan tidak hanya diidentikkan sebagai kegiatan sekolah, tetapi juga proses pembudayaan dalam keluarga dan masyarakat. Maka dengan demikian pendidikan dan kebudayaan merupakan dua sektor strategi yang dapat saling mendukung.

Pendidikan Politik Berbasis Pendekatan Komunitas/Organisasi Sosial

Optimalisasi Pendidikan politik dalam rangka membangun partisipasi politik pada masyarakat usia lanjut di desa-desa dilakukan oleh KPU dengan melakukan pendekatan pada kelompok-kelompok sosial yang termasuk pada Generasi X dan sebagian Baby Boomers. Salah satu bentuk Pendidikan politik yang dilakukan adalah kegiatan *“Sarasehan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Peran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa Dalam Mensukseskan Pemilu Serentak 2024”* baik di tingkat Kecamatan. Hal tersebut merupakan hal yang penting dilakukan mengingat para tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat desa merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh positif dan kewenangan administratif di lingkungan sekitar warga desanya sehingga diharapkan memiliki peran dan andil dalam mendukung partisipasi politik saat pemilu nanti. Penyampaian maksud dan tujuan KPU diharapkan dapat tersampaikan dengan baik oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat secara langsung kepada warganya.

Program pendidikan politik melalui pendekatan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat desa sangat penting karena rata-rata latar belakang pendidikan yang ditamatkan penduduk perdesaan adalah taraf sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang proporsinya cukup besar tinggal di desa. Terlebih lagi jika masih terdapat Generasi Baby Boomers di masyarakat desa yang berusia kisaran 61 hingga 70 tahun keatas yang tidak pernah sekolah sehingga dibutuhkan pendekatan pihak-pihak terkait untuk membangun kesadaran dan partisipasi politiknya. Program Pendidikan politik melalui pemberdayaan desa tersebut dikemas dalam kegiatan sosialisasi dengan tidak hanya untuk penguatan wawasan demokrasi, melainkan juga pemilu yang bersih dan jauh dari kepentingan politik uang. Diyakini, peran aktif

masyarakat akan berdampak pada legitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Karena itu, pendidikan kepada pemilih yang berkesinambungan dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan.

Pendidikan politik melalui pendekatan komunitas di masyarakat dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri dengan menasar pada target generasi yang didominasi Generasi Y dan Z. Beberapa komunitas yang menjadi program kunjungan yaitu Komunitas Pecinta Bola Mania, Komunitas Pecinta Musik Regae, Organisasi Mahasiswa (HMI, PMII, GMNI, IMM), Pemantau Pemilu (JPPR) Organisasi Masyarakat (Karang Taruna, KNPI) Media (Pers). Dalam acara bersama komunitas ini disampaikan materi diantaranya terkait peran musik untuk dapat ikut menyukseskan Pemilu Tahun 2024 salah satunya dengan sosialisasi lewat lagu, serta materi terkait hari pemungutan suara, daerah pemilihan di Kabupaten Kediri, Partai Politik Peserta Pemilu serta pengecekan DPT online.

Sobirovich memaparkan bahwa setiap orang akan dipengaruhi oleh berbagai macam struktur sosial yang secara obyektif termasuk keluarga, kelompok teman sebaya, komunitas profesi, komunitas etnis atau komunitas agama, bangsa, dan lembaga memiliki peran penting sebagai agen sosialisasi politik dan berdampak signifikan pada bentuk *...political attitudes orientations, interests, dan motivation of political behavior*, sehingga dampak perubahan dan ketercapaian yang diterima akan signifikan (Sobirovich 2023). Pendekatan Pendidikan politik melalui komunitas tersebut dilakukan dengan tujuan mendekatkan KPU sebagai lembaga yang mampu membaaur dan mendekatkan diri kepada seluruh elemen komunitas yang ada di masyarakat.

Pendidikan Politik Berbasis Pengembangan Teknologi Media

Pendekatan terhadap Generasi Z dan Pra pemilih (Generasi Alpha) dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri dengan melakukan pengembangan metode sosialisasi berbasis teknologi media massa dan konten digital kreatif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengacu pada karakteristik kedua generasi yang memiliki karakter berpikiran terbuka, menyukai keberagaman, tertantang hal-hal baru, berfikir kritis, ingin menjadi berbeda atau membawa perubahan, terdidik dan menguasai berbagai teknologi elektronik dan komunikasi. Divisi Sosdiklih dan Parmas memiliki orientasi materi pendidikan politiknya yang berkenaan tentang fungsi strategis media sosial dalam sosialisasi Pendidikan pemilih yang dibahas dalam tiga urgensi. Pertama, memasuki revolusi digital 4.0, pertumbuhan pengguna medsos sangat pesat. Penggunaan medsos di Indonesia berkembang cepat seiring meningkatnya infrastruktur internet di Indonesia. Kedua, medsos bersifat dua arah dan terbuka yang memudahkan publik

berpartisipasi dan membangun diskusi, berbagi, mendapatkan informasi dan yang ketiga kehadiran medsos menambah sarana penyebaran informasi.

Optimalisasi teknologi media yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri meliputi pengembangan metode sosialisasi melalui publikasi konten digital yang dibangun di berbagai platform media sosial yang terdiri dari Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok serta channel Youtube. Melalui platform media sosial yang beragam KPU Kabupaten Kediri memiliki program publikasi kegiatan dengan target 60 sampai 70 berita setiap bulannya. Berita tentang program tersebut dikemas dalam bentuk konten digital berupa flyer dan video maupun yang di publikasikan ke semua platform media digital yang telah ada. Tingginya tingkat publikasi yang dilakukan oleh Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Kabupaten Kediri yaitu dalam rangka mendekati masyarakat dengan informasi politik yang disosialisasikan dengan konten secara menarik bagi Generasi Y, Z dan Generasi Alpha.

Pengembangan teknologi media berbasis digital dalam rangka Pendidikan politik juga dikembangkan oleh KPU Kabupaten Kediri melalui program Rumah Pintar Pemilu (RPP). Program tersebut merupakan sebagai bagian bentuk sosialisasi program KPU kepada masyarakat umum, terutama dengan memanfaatkan teknologi daring. Melalui program tersebut, para pelajar yang didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Alpha saat menghadiri peresmian digitalisasi RPP tersebut mengakui bahwa program berbasis digital sangat cocok terlebih lagi untuk Generasi Milenial. Lokasi RPP digital tersebut terletak di salah satu ruang khusus di Kantor KPU Kabupaten Kediri. Pada ruangan RPP para pengunjung disuguhkan beberapa informasi yang terpampang di dinding ruangan dan beberapa layar LED monitor yang memuat konten digital tentang seluruh pengetahuan tentang demokrasi dan Pemilu, beragam buku tentang sejarah dan kaleidoskop KPU, dokumentasi, home theatre, studio Podcast dan beragam barang lainnya sehingga masyarakat bisa mengetahui tentang Pemilu.

Pengembangan sosialisasi politik juga dilakukan dengan Kerjasama KPU Kabupaten Kediri dengan Radio Republik Indonesia (RRI). Tujuan utama Kerjasama tersebut adalah guna melakukan audiensi berkaitan dengan kerjasama dalam hal melakukan pemberitaan tentang persiapan tahapan pemilu 2024. Dalam kerjasamanya pihak RRI berhak untuk mengikuti setiap agenda kegiatan KPU untuk diolah dan dipublikasikan, baik dalam bentuk pemberitaan berita maupun format dialog interaktif dalam program “Kopi Demokrasi” yang menghadirkan pihak KPU sebagai narasumber utama. Beberapa materi yang disampaikan dalam bentuk dialog interaktif antara KPU dan RRI meliputi; “Persiapan logistik Pemilu 2024; rencana Lanjutan Pasca penetapan DPT; Akurasi Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024; Penanganan Pasca Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri; Pencalonan Anggota DPRD;

Mendorong partisipasi Aktif Masyarakat dan Mewujudkan Pemilu Berintegritas; dan Optimalisasi Medsos untuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Basis Milenial. Radio merupakan salah satu media elektronik yang memiliki peminat tersendiri dengan dominasi pendengar dari Generasi X dan Generasi Baby Boomers. Melalui Pendidikan politik melalui media elektronik radio, KPU dapat melakukan optimalisasi sosialisasi tentang partisipasi Pemilu 2024 secara tidak langsung kepada kedua Generasi tersebut.

Tingginya peran media yang begitu pesat sudah semestinya dapat optimalkan penggunaannya dengan bijak dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik warga di era Industri 4.0 saat ini. Beragam manfaat kemudahan dapat diperoleh dari berbagai segmen dengan keuntungan akses layanan yang terjangkau, jaringan yang lebih luas, dan terbukanya inovasi bisnis baru. Secara nyata pesatnya transisi perkembangan teknologi digital juga berdampak terhadap transformasi model interaksi dan relasi manusia (H Sugara and Mutmainnah 2021). Semua ini memiliki implikasi penting bagi berfungsinya sistem politik dan kualitas demokrasi (Barokah 2022). Sebagaimana dipaparkan Muzaffar, Chohdhry, & Afzal bahwa *“Owen opined that with the beginning of the internet, digital communication technologies have increased the participation of youth in social media”* (Muhammad Muzaffar 2019). Media sosial diibaratkan *“a hot cake for the young”* yang saling menghubungkan sesama generasi dan bahkan lintas generasi untuk saling bertukar pandangan politik. Jejaring Sosial memainkan peran penting dan dinamis untuk kemajuan kaum muda karena membantu dan menyediakan platform untuk mendapatkan pengetahuan dasar politik.

Pendidikan Politik Melalui Pendekatan Kolaboratif dan Partisipatif

Strategi Pendidikan politik juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Strategi tersebut diwujudkan melalui program rekrutmen kepanitiaan bagi masyarakat sebagai tenaga pendukung panitia pemilihan kecamatan (PPK), anggota panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS). Program tersebut merupakan kebijakan yang telah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Melalui program tersebut implementasi Pendidikan politik kepada masyarakat dilakukan dengan konsep kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam turut serta menyelenggarakan jalannya proses Pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Dalam pelaksanaan teknis rekrutmen PPK, PPS dan KPPS masyarakat yang turut serta banyak melibatkan Generasi Y dan Z. Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun

2022 Pasal 35 poin (b) yang menerangkan bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.

Dalam praktiknya KPU kunjungannya terutama ke beberapa kampus di Kediri menyampaikan bahwa selain memilih, para mahasiswa juga dapat berpartisipasi dalam pemilu 2024 salah satunya dengan menjadi penyelenggara pelaksanaan Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa. Melalui kegiatan kepanitiaan PPK, PPS dan KPPS, KPU berkolaborasi dengan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam rangka Pendidikan politik kepada masyarakat Generasi Y dan Z secara langsung dalam bentuk kepanitiaan. Selain itu anggota PPS harus memiliki keberanian untuk menolak pemberian apapun dari seseorang yang memiliki kepentingan pada pelaksanaan Pemilu 2024. Termasuk memiliki keberanian menolak aksi-aksi *money politic* yang menjadi fenomena di setiap agenda politik. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain: 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan, 3) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman damai tertib dan lancar, dan 4) Meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas (Iriyanti 2022).

Peranan KPU dan PPK, PPS dan KPPS sebagai penyelenggara di tingkat bawah ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini dilakukan untuk memperkokoh atau memperkuat badan atau lembaganya guna menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tujuan sebagai penyelenggara akan sesuai yang diinginkan (Haryono 2018). Melalui program kolaboratif dan partisipatif tersebut generasi masyarakat yang terlibat dilakukan edukasi agar memiliki karakter tanggungjawab, integritas, pribadi yang kuat, jujur dan bersikap adil sehingga mampu menjaga amanah konstitusi. Hal tersebut sebagai bentuk penguatan demokrasi dengan mengembangkan keterampilan generasi muda yang terus dikembangkan pada konsep warga negara kritis dan partisipatif sehingga perlu ada keseimbangan antara penerapan sistem demokrasi dalam suatu negara dengan kesiapan sumber daya manusia negaranya yang siap menjalankan praktik demokrasi (Sugara 2022). Karakter tersebut ditanamkan dan diikat dalam prosesi pelantikan para anggota PPS ini dengan membacakan komitmen pakta integritas untuk bertekad bekerja keras menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta professional.

SIMPULAN

Implementasi pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri dalam membangun partisipasi politik, dilakukan melalui penguatan peran, tugas dan kewenangan kelembagaan. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya keterlibatan Komisioner Divisi

Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Kediri dengan banyak menggandeng lembaga eksternal yang meliputi Forkopimda/Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, Bawaslu Kabupaten Kediri, Stakeholder (Bakesbangpol, DPMPD, Dispendukcapil, Diskominfo, Cabang Dinas Pendidikan), Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, Partai Politik di Kabupaten Kediri, Organisasi Mahasiswa, Pemantau Pemilu (JPPR) Organisasi/Komunitas Masyarakat, dan Media (Pers). Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan dikemas dalam berbagai program kerja KPU yang memiliki segmentasi generasinya masing-masing. Program pendidikan politik yang telah diimplementasikan yaitu Pertama, melalui jalur formal ditempuh oleh KPU dengan tujuan peningkatan partisipasi politik pada pendidikan tinggi dan menengah dengan menasar kalangan Generasi Y dan Z. Kedua, pendidikan politik berbasis pendekatan seni dan budaya kemasyarakatan dengan menasar Generasi X, Y dan Baby Boomers. Ketiga, pendidikan politik berbasis pendekatan komunitas/organisasi sosial dengan menasar Generasi X dan Baby Boomers. Selain itu pada organisasi sosial kepemudaan dengan menasar Generasi Y dan Z. Keempat, pendidikan politik berbasis pengembangan teknologi media sosial dengan menasar dominasi Generasi Z dan Alpha (pra pemilih). Kelima, pendidikan politik melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif dengan banyak melibatkan Generasi Y dan Z. Maka sasaran pendidikan politik dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri telah memperhatikan perbedaan lintas generasi Baby Boomers, generasi X, Y, Z dan juga generasi Alpha dengan berbagai bentuk program adaptif, kolaboratif, inovatif, kreatif dan partisipatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan penelitian dengan skema penelitian dosen pemula yang didanai oleh Kemenristek Dikti tahun 2023. Oleh karena kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenristek Dikti atas dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan LPPM Universitas Kahuripan Kediri serta KPU Kabupaten Kediri atas izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Barokah, Fitria & Hertanto. (2022). “Disrupsi Politik: Peluang Dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024.” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21 (1): 1–13.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan (Edisi Ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuad, D. R. S. M., Musa K., & Hashim, Z. (2022). “Innovation Culture in Education: A Systematic Review of the Literature.” *Management in Education* 36 (3): 135–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0892020620959760>.
- Haryono, Dwi. (2018). “Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan

- Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015.” *Jurnal Administrative Reform* 6 (2): 67–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52239/jar.v6i2.1900>.
- Iriyanti, Sri & Martini. (2022). “Pendidikan Politik Dan Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilu (2024).” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Abdimas*.
- Jati, Wasisto Raharjo. (2021). “Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021.” *The Insights* 27.
- Jones, Philip Edward. (2020). “Partisanship, Political Awareness, and Retrospective Evaluations, 1956–2016.” *Political Behavior* 42 (4): 1295–1317. <https://doi.org/10.1007/s11109-019-09543-y>.
- Muhammad Muzaffar, Sarwat Chodhry & Naila Afzal. (2019). “Social Media and Political Awareness in Pakistan: A Case Study of Youth.” *Pakistan Social Sciences Review* 3 (2): 1–13. [https://doi.org/10.35484/pssr.2019\(3-II\)01](https://doi.org/10.35484/pssr.2019(3-II)01).
- Persson, Mikael. (2015). “Education and Political Participation.” *British Journal of Political Science* 45 (3): 689–703. <https://doi.org/10.1017/S0007123413000409>.
- Sawyer, P. S., & Korotayev, A. V. (2022). “Formal Education and Contentious Politics: The Case of Violent and Non-Violent Protest.” *Political Studies Review* 20 (3): 366–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1478929921998210>.
- Shahreza, Mirza. (2017). “Komunikator Politik Berdasarkan Teori Generasi.” *Journal Od Communication (Nyimak)* 1 (1): 33–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org-/10.31000/nyimak.v1i1.273>.
- Sobirovich, Sattarov Timur. (2023). “Political Socialization As A Socio-Psychological Category.” *World Bulletin of Social Sciences* 18: 101–4.
- Sugara, H, and F Mutmainnah. (2021). “Strategi Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Pembelajaran PPKn Menghadapi Digitalisasi 4.0.” *Jurnal Koulutus: Jurnal Pendidikan Kahuripan* 4 (2): 194–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.51158/koulutus.v4i2.701>.
- Sugara, Harry. (2022). “Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wawasan Demokrasi Warga Negara.” *Jurnal Koulutus: Jurnal Pendidikan Kahuripan* 5 (1): 103–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.51158/koulutus.v5i1.822>.
- The Economist Intelligence Unit. (2021). “Democracy Index 2020: In Sickness and in Health?” *Retrieved from Wwww.Eiu, 2021*.